SKRIPSI

ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan UIN SUSKA RIAU)

UIN SUSKA RIAU

Di Susun Oleh :

NOVA RIA WULANDARI

11573200927

PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTERASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	NOVA RIA WULANDARI
NIM	:	11573200927
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN	:	AKUNTANSI S1
JUDUL	:	ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN UIN SUSKA RIAU).

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Nasrullah Djamil,SE, M.Si, Ak,CA

NIP. 19780808 200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN	KETUA JURUSAN
Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, M.Ag, MM	**Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak,CA**
NIP. 19620812 198903 1 003	**NIP. 19780808 200710 1 003**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: NOVA RIA WULANDARI
NIM	: 11573200927
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN	: AKUNTANSI S1
JUDUL	: ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN UIN SUSKA RIAU).
TANGGAL UJIAN	: JUM'AT, 06 DESEMBER 2019

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Nurfaizal, M.Ag

NIP. 19560921 198803 1 001

MENGETAHUI

PENGUJI I	PENGUJI II
Febri Rahmi, SE, M.Sc. Ak	**Ferizal Rahmad, SE, MM**
NIP. 19720209 200604 2 002	**NIP. 19750216 201411 1 001**

ABSTRAK

"ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK"

(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan UIN SUSKA RIAU)

OLEH:
NOVA RIA WULANDARI
11573200927

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang system perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan Karena kesengajaan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sampel pada penelitian ini sebanyak 65 responden. Analisis data menggunakan validitas dan realibilitas, uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis menggunakan metode independent sampels t-test. Hasil independent sampels t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan karena kesengajaan.

Kata Kunci : *Sistem Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Kecurangan Karena Kesengajaan, dan Penggelapan Pajak*

"ANALYSIS OF DIFFERENCES IN PERCEPTION OF ACCOUNTING ACCOUNTING STUDENTS OF TAXATION ACCOUNTING CONCERNING TAXATION"

(Study of Accounting Department Students Accounting Taxation Concentration UIN SUSKA RIAU)

***BY*:**
NOVA RIA WULANDARI
11573200927

ABSTRACT

This study aims to determine whether there are differences in perceptions between male and female students majoring in accounting in the tax accounting concentration of UIN SUSKA Riau regarding tax evasion from the point of view of the taxation system, justice, discrimination, and deliberate fraud. This study uses primary data obtained through filling out questionnaires. The sample selection method in this study used a purposive sampling technique, the sample in this study was 65 respondents.Data analysis uses validity and reliability, descriptive statistical tests, normality test, and hypothesis testing using the independent sample t-test method. The results of the independent sampels t-test showed that there were differences in perceptions between male and female students majoring in accounting in the tax accounting concentration of UIN SUSKA Riau regarding tax evasion from the point of view of the taxation system, justice, discrimination, and deliberate fraud.

Keyword* :Taxation System, Justice, Discrimination, Deliberate Fraud, Dan Tax Evasion*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan UIN SUSKA RIAU)".**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakuntas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, saran, kritik serta semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, AK, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, AK, CA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukkan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Hidayati Nasrah, SE, M.cc, Ak, selaku Penasehat Akademisi yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Segenap karyawan dan tata usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah sabar dan iklas telah membantu penulis dalam segala hal urusan di kampus.
8. Kedua orang tua saya ayahanda Solikin dan ibunda Amih Sapnih yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat, rasa kasih dan sayang, ketulusan cinta dan mendukung saya baik secara moril dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dan ibunda tercinta.
9. Segenap keluarga besar penulis, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, serta doa kepada penulis.

10. Sahabat penulis bang Arif Mudi Priyatno, ST, Irma Wulandari, Rusmiati, Migi Setya Pratiwi, S.Pd, Rahma Apriani, S.Pd, M. Safrudin, dan kakak kos Rita Asmara, SE, yang telah Banyak membantu saat perkuliahan dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini dan tak bosannya mendengarkan keluh kesah dalam perkuliahan.
11. Sahabat dan teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan Aisa Rahmawati, Ainun Mardiah, Novi Anggraini, Devikha Asmaditha S, Reska Zahera, Ayu Fitriani, Wdiani, Windi Oktami, Sri Anggi Dewi, Respita Nurma Desti, Endang Hariyati, Nina Sani Fajarini, Intan Nurjanah, bang Rama, Nora Asnawati dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi untuk sama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 Lokal H, dan seluruh teman-teman S1 Akuntansi Konsentrasi Perpajakan Lokal C angkatan 2015 yang tidak bisa dituliskan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman KKN Desa Sungai Rambai Beno Saputra, Muhammad Sukarso, Agitri Wahyu Nugraha, Dandi Prima Wijaya, Atika Wardani, Rusmiati, Fitri Yani, Fitria Marlina, Yul Suryani, Azura yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman yang penulis kenal dan seluruh pihak yang telah membantu dan telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membalaskan segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maa apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 12 November 2019

Nova Ria Wulandari

11573200927

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu pemasukan negara yaitu berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti alat transportasi, stasiun, dan jalan raya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013) dalam Paramita (2016). Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2016:11) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang

pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat dan bukannya berkurang, sebab jumlah wajib pajak cenderung bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi banyak rakyat yang tidak dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan, padahal penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya.

Sampai saat ini sudah banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Mughal (2012) dalam Reskino, dkk (2014), menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak dimana mereka tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Reskino, dkk (2014), menyatakan hal yang biasa melatar belakangi tindakan penggelapan pajak biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi suatu kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bahkan

tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang kerap melakukan praktik penggelapan pajak, bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan.

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Penggelapan pajak terjadi karena wajib pajak berniat untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya kepada pemerintah. Terjadinya praktik penggelapan pajak ini akan mempengaruhi laporan laba rugi yang menghasilkan laba menjadi lebih kecil atau lebih sedikit sehingga akan mempengaruhi laporan fiskal. Karena apabila laba yang diperoleh oleh wajib pajak kecil maka beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pun akan lebih kecil atau sedikit. Terdapat banyak bentuk dan modus penggelapan pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 diantaranya ialah menggelembungkan biaya, menyembunyikan omset modus, memalsukan faktur pajak, rekayasa bukti potong, dan mengkapitalisasi kerugian.

Kecurangan pajak atau penggelapan pajak adalah suatu realitas yang sebenarnya dikonstruksi oleh orang-orang yang berada dalam sistem perpajakan termasuk unsur-unsur sistem perpajakan itu sendiri. Mangoting (2017). Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak *(tax evasion).*

Pada tanggal 10 Januari 2019 terungkap kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh GS (33) mantan karyawan PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC). Kasus ini terungkap berkat aplikasi Samsat Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat). Sebelum dipecat, GS bertugas mengurus kendaraan operasional PKC sejak 2015, dia juga diberi tugas membayar pajak kendaraan operasional, tapi tidak dia bayarkan semuanya. Penggelapan itu diketahui oleh para sopir kendaraan operasional PKC. Diduga kuat, penggelapan itu berlangsung sejak tahun 2015. Uang pajak yang digelapkan mencapai sekitar Rp 400 juta. Setiap tanggal waktu pembayaran pajak rata-rata ia mengurusi 20 unit, yang digelapkan sekitar 10 atau 12 mobil. GS mengaku menggunakan uang tersebut untuk foya-foya. (m.detik.com). Diakses pada 22 April 2019.

Pada tanggal 12 April 2017 direktur Reskrimsus Kombes Johny Eddizon Isir melakukan koordinasi untuk menentukan besaran kerugian negara atas dugaan penyelewengan ratusan pajak SKPD. Sudah dua orang berinisial D dan J sebagai tersangka dalam dugaan korupsi ini, yang merupakan operator yang mengetahui sistem program data. Terciumnya kasus ini berawal dari laporan adanya keganjilan SKPD milik kendaraan wajib pajak, dimana salahsatunya tidak ada paraf dalam kolom korektor dihalaman SKPD (lembaran belakang STNK kendaraan, red). Harusnya kolom itu diisi oleh pihak pengkorektor, sebagai bukti syarat sudah dipenuhinya syarat di lembar kedua surat tersebut. Namun faktanya malah kosong. Menurut kepolisisan, ada sekitar 400 lembar SKPD Kendaraan yang mengalami hal tersebut. (m.goriau.com). Di akses pada 12 April 2019.

Reskino, dkk (2014) menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak *(tax evasion).* Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun.

Sampai saat ini sudah banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Fuad Rahmany (2011) dalam Paramita (2016) pernah mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Persepsi merupakan proses di mana seseorang menentukan, berupaya, dan menerjemahkan stimulasi ke dalam suatu uraian yang harmonis dan penuh makna (Lubis, 2011:97) dalam Paramita (2016). Menurut Gibson (2001) dalam Paramita (2016) persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian dipahami dan

ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu dan faktor lingkungan, sehingga akan menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut.

Pemerintah berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mulai memfokuskan sosialisasi kepada mahasiswa, yang dimana hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan mahasiswa sebagai *agent of change* dalam permasalahan penggelapan pajak. Mahasiswa dituntut untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan, mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam memberikan kontribusi yang konkret dalam setiap kebijakan pemerintah yaitu dengan memberikan informasi perpajakan yang benar kepada masyarakat, agar tidak menjadi *free rider* dan mengubah pola pikir masyarakat mengenai pajak.

McGee, *et. al*., (2008) dalam Reskino, dkk (2014), meneliti penggelapan pajak *(tax evasion)* melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Baik mahasiswa di Hong Kong maupun di Amerika Serikat menentang pandangan bahwa penggelapan pajak adalah etis/dibenarkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa

di Amerika Serikat lebih menentang penggelapan pajak *(tax evasion)* dibandingkan mahasiswa di Hong Kong.

Musaibah, *et. al.*, (2012) dalam Reskino, dkk (2014), meneliti perbedaan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi, bisnis, dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk salah satu dari 18 pertanyaan yang diajukan. Hasil studi menunjukkan bahwa penggelapan pajak adalah etis dalam kondisi tertentu. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak selalu atau hampir selalu etis. Responden membenarkan penggelapan pajak sebagai praktek etis jika sistem pajak tak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Argumen paling lemah adalah dalam kasus penggelapan pajak saat ini dilihat dari persepektif islam. Sebagai muslim penggelapan pajak tidak dapat dibenarkan.

Penelitian ini menggunakan dimensi atau indikator penelitian :

1. Sistem Perpajakan. Sistem pajak adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat untuk pembiayaan negara.
2. Keadilan Perpajakan. Keadilan pajak yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak.
3. Diskriminasi Pajak. Diskriminasi pajak ini dapat merusak keadilan dalam perpajakan.

4. Kecurangan karena kesengajaan. Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berprilaku. Sengaja berarti wajib pajak memang menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni (2018) dan mendapatkan hasil penelitian dalam persepsinya mahasiswa bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Utami dan Widodo (2015), menyatakan Mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak itu “kadang-kadang etis”. Namun didapatkan hasil yang berbeda ketika penelitian ini diujikan kepada mahasiswa hukum. Persepsi mahasiswa hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu persepsi bahwa penggelapan pajak itu “kadang-kadang etis” dan persepsi bahwa penggelapan pajak itu “tidak pernah etis”. Penelitian Reskino, dkk (2014), mendapat hasil tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S1 maupun mahasiswa program S2, namun mahasiswa akuntani program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi program S2 walaupun perbedaan ini tidak signifikan.

Uraian di atas menjelaskan tentang adanya perbedaan perspektif mengenai penggelapan pajak. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui apakah ada perbedaan perspektif antara mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan pria dan wanita Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan uraian latar belakang, dalam mencari jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini yang merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Reskino, dkk (2014). Faktor-faktor dalam penelitian tersebut di uji kembali dalam penelitian ini guna mendapatkan keyakinan yang mendalam mengenai keterkaitan faktor sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak. Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : Sampel penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi konsentrasi pajak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sedangkan penelitian terdahulu mengambil sampel mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa program S2 dengan perwakilan minimal satu universitas dimasing-masing wilayah di Jakarta. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014, dan peneliti juga menambahkan kecurangan karena kesengajaan untuk indikator penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak (studi pada mahasiswa Jurusan Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan UIN SUSKA Riau)".**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi ?
4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat bagi :

1. Bagi peneliti, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi pajak uin suska riau mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion).*
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi pajak mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion).*

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini, maka sistem penulisannya akan dibagi kedalam beberapa bab sebai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Theory Of Planned Behavior

Ajzen (1991) dalam Kurniawati (2014) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

a. *Behavioral Belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
b. *Normative Belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan

suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*).

c. *Control Belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991 dalam Kurniawati, 2014).

2.2 Persepsi

Abizar (1998) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dimana seseorang individu memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya. Persepsi ini juga menentukan cara kita berperilaku terhadap suatu obyek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi persepsi seseorang nantinya akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya.

Menurut Arifin, Fuady dan Kuswarno (2017:92) dalam Lamia (2018), persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang seperti proses belajar, perhatian,

karakter individu, keinginan, perasaan, kejiwaan, keadaan fisik, minat, motivasi dan kebutuhan. Yang dimaksudkan dengan faktor eksternal ialah informasi yang diperoleh, pengetahuan, kebutuhan, intensitas, pengulangan gerak, latar belakang keluarga, hal-hal baru dan ketidak asingan objek.

Menurut Boeree (2016:109) persepsi dalam artian paling luas adalah soal interaksi antara dunia dan diri. Dalam bentuknya yang paling sederhana, dunia memberi kita kejadian-kejadian; pada gilirannya kitapun memberi makna pada kejadian-kejadian itu dengan menafsirkan dan bertindak berdasarkan kejadian itu.

Menurut Prasetyo (2010) dalam Abrahams (2016), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Presepsi adalah suatu proses petunjuk petunjuk inderawi *(sensory)* dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

Menurut Robbins (2010:54) persepsi merupakan proses dimana kita mengartikan lingkungan sekitar dengan menyusun dan menginterpretasikan impresi sensoris. Penelitian tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa setiap orang bisa melihat hal yang sama tetapi berbeda mempersepsikannya. Sehingga persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana mahasiswa melihat dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau tindakan terkait penggelapan pajak.

Gambar 2.1

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

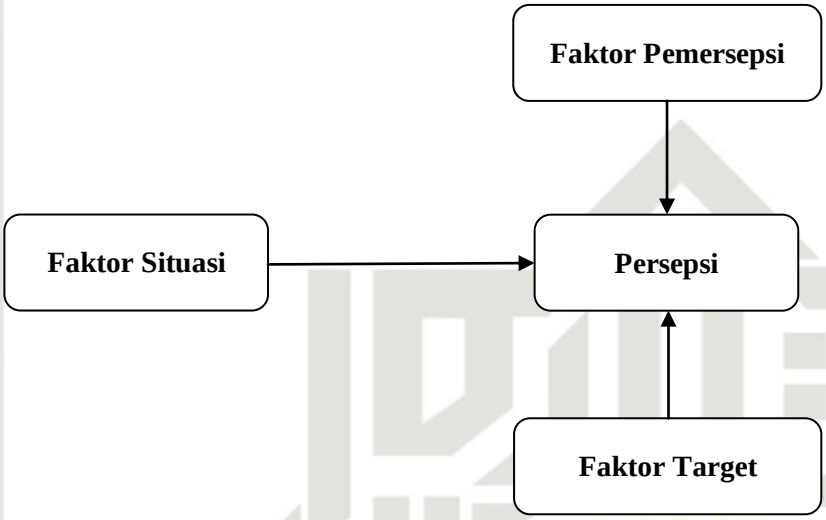

Sumber : Stephen P. Robbins (Manajemen. 2010)

Persepsi seseorang tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda, meskipun apa yang dilihatnya sama. Menurut Stephen P. Robbins, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :

1. Individu yang bersangkutan (Pemersepsi)

   Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

2. Sasaran dari persepsi

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

3. Situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas yang engungkapkan tentang persepsi, dapat kita ketahui bahwa proses pembentukan persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengalaman, kemampuan, individu dan lain sebagainya. Proses pembentukan itu sendiri dapat di kelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

2.3 Akuntansi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh

pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Supriyanto, 2011:3).

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

2.3.2 Proses Akuntansi Perpajakan

Sebenarnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia

kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu.

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiridengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan.

Gambar 2.2

Siklus Akuntansi Perpajakan

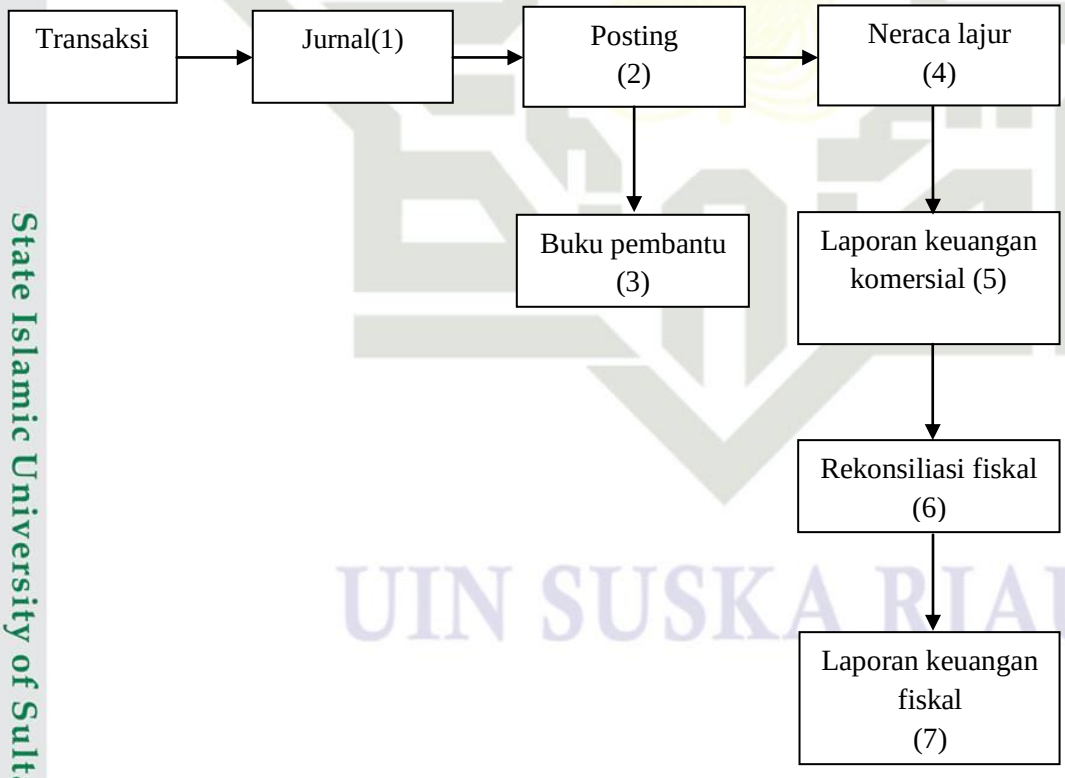

Sumber : Eddy Supriyanto (Akuntansi Perpajakan.2011).

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan ketentuan mengenai wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan (WPB) diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan semua transaksi perusahaan disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan diahiri dengan pembuatan

laporan keuangan. Dari definisi tersebut dapat kita samakan antara pembukuan dengan akuntansi itu sendiri.

Bagi WPOP yang peredaran bruto atau penjualan brutonya selama satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dapat menggunakan pencatatan. Pencatatan merupakan proses menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghitungan penghasilan ini biasanya berdasarkan estimasi atau perkiraan dari wajab sendiri. Hal ini diperbolehkan karena alasan kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi itu sendiri. Sehingga dalam pencatatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan akurat. Namun bagi WPOP yang memilih sendiri untuk menggunakan pembukuan dalam melaporkan kekayaan dan penghasilannya juga diperbolehkan.

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluran-pengeluarannya. Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak mendapatkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (SyaratYuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

   Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial)

   Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

   Sistem pemungutan yang sedeerhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakn yang baru.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya Menurut Mardiasmo (2016:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

   Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

   a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

   b. Sistem perpajakkan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antaralain :

a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

2.4 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2.4.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016:11), *Tax Evasion* atau penggelapan pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

Setiawan (2008:181) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), menyatakan *tax evasion* yaitu "cara menghindari pajakdengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakanyang berlaku. Bila diketemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidanasesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Palil e*t.*

al., 2016; Mujiati dkk, 2017; Kurniawati dan Toly, 2014) dalam Faradiza (2018). Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adnaya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarakan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan.

Penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. (Mardiasmo, 2009) dalam Reskino (2014).

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), adalah sebagai berikut:

a. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu,

b. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil,

c. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada risikonya,

d. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat,

e. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak,

f. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Penelitian McGee (2006) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut hasil penelitiannya mengemukakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Atribusi *(Atribution Theory).* Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee (2006) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), menemukan bahwa *tax evasion* memiliki tiga pandangan yaitu:

1. *Tax evasion* dianggap tidak pernah etis

   Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn, 1998) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018).

2. *Tax evasion* dipandang selalu etis

   Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintahan yang korupsi.

3. *Tax evasion* dapat dipandang etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

Dalam Reskino, dkk (2014) mengungkapkan bahwa penggelapan pajak di Indonesia masih banyak dilakukan. Contoh kasus penggelapan pajak :

1. Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya
2. Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif
3. Transaksi *export* fiktif
4. Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum secara keseluruhan. Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang "paling sedikit" namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Sebab-Sebab WP Melakukan Penggelapan Pajak

Menurut Wallscutzky dalam Reskino, dkk (2014) sebab-sebab WP melakukan *tax avision* adalah :

1) WP berpersepsi tentang :
   (a) Tarif pajak terlalu tinggi
   (b) Sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang
   (c) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh WP

2) Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku.

3) Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan *tax evasion.*

4) *Tax audit,* pelaporan informasi dan potongan dalam pajak.

5) Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh *tax payer.*

6) Praktisi pajak.

7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah.

8) *Servis* dari Wajib Pajak yang kurang di nikmati.

2.4.3 Akibat-akibat penggelapan pajak

Menurut Sari (2013:54), penggelapan pajak berdampak pada :

1. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak atau penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidak seimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll.

2. Dalam bidang ekonomi

Pengelakan pajak atau penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar sehingga perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan lebih besar dari perusahaan yang jujur. Walaupun dengan usaha dan

produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Pengelakkan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi.

Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakkan pajak. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

3. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja dengan membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sangsi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang lainnya.

Penggelapan pajak terjadi karena wajib pajak berniat untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya kepada pemerintah. Terjadinya praktik penggelapan pajak ini akan mempengaruhi laporan laba rugi yang menghasilkan laba menjadi lebih kecil atau lebih sedikit sehingga akan mempengaruhi laporan fiskal. Karena apabila laba yang diperoleh oleh wajib

pajak kecil maka beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pun akan lebih kecil atau sedikit.

2.5 Dimensi / Indikator Penelitian

1. Sistem Perpajakan.

Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan atau wajib pajak agar dapat masuk dalam kas negara. Menurut Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official Assessment System*.

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Official Assessment System* diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri dari *Official Assessment System* :

1. Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak (fiskus) yang dipilih dalam pengelolaan pajak.
2. Pajak terhutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
3. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System.*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak. Penerapan *Self Assessment System* ini berlaku untuk jenis pajak pusat seperti, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Ciri-ciri *Self Assessment System :*

1. Penentuan atas besaran pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak.
3. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat untuk melapor, telat membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

c. *With Holding System.*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat.

Contoh penerapan sistem perpajakan ini adala pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu karyawan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayarkan pajak terhutang tersebut. Jenis- jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan *With Holding System* yaitu seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Keadilan Pajak.

Mardiasmo (2009) dalam Aligarh (2017) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadlian dalam pnerapan undang-undang pajak. Keadilan oleh Siahaan (2010:112) dalam Aligarh (2017) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu: prinsip manfaat (*Benefit Principle)*, prinsip kemampuan untuk membayar (*Ability To Pay*), keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

3. Diskriminasi Pajak.

Velasques (2005) dalam Aligarh (2017) mendefinisikan diskriminasi yaitu membedakan suatu objek dari objek lainnya Sebagai contohnya adalah tidak adanya keseimbangan tugas antara pria dan wanita. Hubungan antara diskriminasi pajak dengan persepsi etika penggelapan pajak dapat dikatakan semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak maka penggelapan pajak dapat dipandang sebagai

perilaku yang etis, namun semakin rendah tingkat diskriminasi pajak maka penggelapan pajak dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak etis (Suminarsih, 2011) dalam Aligarh (2017).

4. Kecurangan Karena Kesengajaan.

Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berprilaku (Mangoting, 2017). Sengaja berarti wajib pajak memang menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Dalam (Mangoting, 2017) kesengajaan menurut KBBI adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sengaja dilakukan. Dalam penelitian ini kecurangan wajib pajak sengaja dilakukan karena wajib pajak merasakan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan yang dirasakan masih belum berpihak kepada wajib pajak. Selain itu penegakan hukum belum merata sehingga ada wajib pajak sebagai PKP yang tidak memungut PPN tetapi belum mendapatkan sanksi, dan pengalaman wajib pajak menghadapi petugas yang terkesan mencari-cari kesalahan wajib pajak untuk mendapatkan temuan pemeriksaan.

Kecurangan pajak adalah upaya kesenjangan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemeriksaan. Dalam istilah hukum pidana kesengajaan ini disebut dengan sengaja sadar akan kemungkinan atau kesengajaan secara keinsafan (Ilyas, 2012) dalam (Mangoting, 2017).

2.6 Pajak Menurut Persepektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul,

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain (Munawwiw, 2002) dalam Surahman dan Ilahi (2017). Sedangkan secara umum pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara.

Ada sebuah hadis yang berbunyi, "*Tidak masuk surga petugas pajak*". Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah Orang yang mengambil *'ushr* (bea cukai) dari harta kaum Muslimin secara paksa yang melampaui batas, sehingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya. Petugas pemungut *'ushr* (bea cukai)dalam hadis ini juga diterjemahkan sebagai petugas pajak, padahal maksudnya adalah petugas pemungut *'ushr* (bea cukai) (Gusfahmi, 2007) Surahman dan Ilahi (2017).

Penggelapan Pajak Menurut Pandangan Islam

Tindakan penggelapan atau diharamkan dalam islam, karena di anggap tidak menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Allah SWT memerintahkan agar memelihara amanah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 27:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"*. (QS. Al-Anfal;27).

Surah An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil". (An-Nisa:29)

2.7 Penelitian Terahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	**Nama/ Tahun**	**Judul**	**Rumusan Masalah**	**Hasil Penelitian**
1.	James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018)	Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)	Bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*?	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwadalam persepsinya mahasiswa bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2.	Titah Galih Utami dan	Persepsi Mahasiswa	Persepsi Mahasiswa	Mahasiswa akuntansi

	Agus Widodo (2015)	Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak	Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak	mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak itu "kadang-kadang etis". Namun didapatkan hasil yang ber-beda ketika penelitian ini diujikan kepada mahasiswa hukum. Persepsi mahasiswa hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu persepsi bahwa penggelapan pajak itu "kadang-kadang etis" dan persepsi bahwa penggelapan pajak itu "tidak pernah etis".
3.	Reskino, Rini, Dinda Novitasari (2014)	Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak	Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S1 dengan mahasiswa akuntansi program S2?	1. Berdasarkan hasil uji *Independent Sample T-tes* tidak ada perbedaan anatara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dengan mahasiswa akuntansi program S2. 2. Berdasarkan analisis deskriptif tidak

				terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2. Tetapi mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah hal yang tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi program S2.
4.	Miranda Lamia, Jenny Morasa, Sintje Rondonu (2018)	Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak	1. Bagaimana persepsi calon wajib pajak mahasiswa atas tindak penggelapan pajak darisudut pandang sistem pajak yang berlaku di Indonesia saat ini? 2. Bagaimana persepsi calon wajib	1. Berdasarkan penilaian yang baik terhadap sistem pajak maka persepsi calon wajib pajak mahasiswa di Politeknik Negeri Manado atas tindak penggelapan pajak adalah tidakwajar jika dilakukan oleh wajib pajak. 2. Dengan

			pajak mahasiswa atas tindak penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak? 3. Bagaimana persepsi calon wajib pajak mahasiswa atas tindak penggelapan pajak darisudut pandang diskriminasi ?	terwujudnya rasa keadilan dalam perpajakan maka persepsi calon wajib pajak mahasiswa di Politeknik Negeri Manado atas tindak penggelapan pajak adalah tidakwajar jika dilakukan oleh wajib pajak. 3. Dengan tidak ditemukannnya diskriminasi dalam perpajakan maka persepsi calon wajib pajak mahasiswa di Politeknik Negeri Manado atas tindak penggelapan pajak adalah tidakwajar jika dilakukan oleh wajib pajak.
5.	Martha Ayu Lusiana Wahyudi (2016)	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa	1. Bagaimana persepsi mahasiswa atas tindak penggelapan pajak dari sudut	1. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel

		Jurusan Akuntansi Universitas Nusantara PGRI)	pandang keadilan? 2. Bagaimana persepsi mahasiswa atas tindak penggelapan pajak darisudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini? 3. Bagaimana persepsi mahasiswa atas tindak penggelapan pajak darisudut pandang diskriminasi?	keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan

				pajak. 3. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak.
6.	Indah Puspitasari, Dewi Kusuma Wardani (2013)	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tingkat Kepatuhan Atas Pelaksanaan Self *Assessment System* Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Penyelundupan Pajak *(Tax Evasion):* Studi	Bagaimana hubungan persepsi wajib pajak orang pribadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan *self assessment system* terhadap tindakan penyelundupan pajak *(tax evasion)?*	Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan *self assessment system* berkaitan signifikan terhadap adanya tindakan penyelundupan pajak *(tax evasion*) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta. Hubungan antara tingkat kepatuhan atas

		Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta		pelaksanaan *self assessment system* pengaruhnya terhadap penyelundupan pajak *(tax evasion*) juga dipengaruhi oleh variabel lain yang diteliti diantaranya adalah sistem perpajakan, kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial, tarif pajak yang tinggi serta pelayanan fiskus yang kadang mengecewakan.
7.	Dhinda Maghfiroh, Diana Fajarwati (2016)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi)	1. Apakah persepsi wajib pajak mengenai keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak? 2. Apakah persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh	1. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. sehingga H1 tidak terdukung. 2. Hasil pengujian empiris menunjukkan

			terhadap penggelapan pajak? 3. Apakah persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?	bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 3. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga H3 terdukung.
8.	Nurma Risa (2017)	Sensitivitas Etis Mahasiswa Atas Penggelapan Pajak	1. Apakah terdapat perbedaan persepsi atas etika penggelapan pajak antara mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik? 2. Apakah	1. Tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa FE dan FISIP. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Mahasiswa program studi

			terdapat perbedaan persepsi atas etika penggelapan pajak antara mahasiswa pria dan wanita?	manajemen cenderung memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa program studi akuntansi. 2. Tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa pria dan wanita.
9.	Frank Aligarh (2017)	Penggelapan Pajak: Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Kedokteran Dan Hukum	1. Apakah ada perbedaan persepsi mahasiswa Akuntansi, hukum, dan kedokteran mengenai etika penggelapan pajak? 2. Kelompok mana yang lebih menentang penggelapan pajak dan mana yang lebih tidak menentang?	1. Terdapat perbedaan persepsi yang signifi kan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran. 2. Menunjukan bahwa mahasiswa Akuntansi lebih menentang dalam penggelapan pajak karena persepsi tentang penggelapan pajak

				cenderung merugikan negara dan masyarakat luas. Sedangkan mahasiswa Hukum lebih tidak menentang penggelapan pajak jika dibandingkan dua kelompok lainnya.

Sumber : Berbagai Jurnal Terdahulu yang Dipublikasikan

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI KONSENTRASI PAJAK

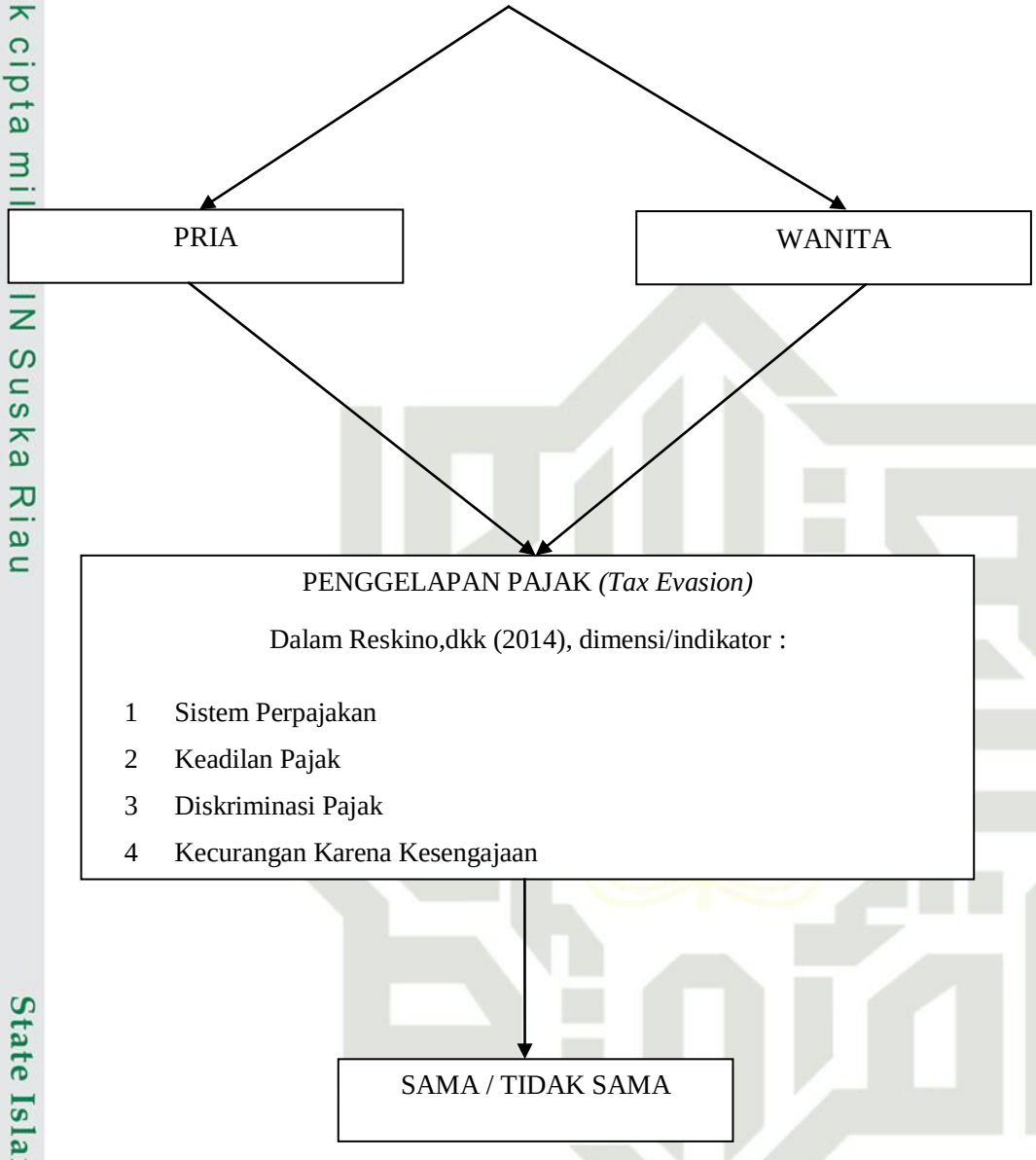

Sumber : kerangka konseptual penulis, 2019

2.8 Hipotesis Penelitian

Penggelapan pajak *(tax evasion)* mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016:11), *Tax Evasion* atau penggelapan pajak adalah usaha

meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

Setiawan (2008:181) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), menyatakan *tax evasion* yaitu "cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila diketemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Menurut Mardiasmo (2016:9), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Official Assessment System* .

   Suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

   Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Jadi yang berwenang menentukan pajak terutang adalah Wajib Pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

   Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Wicaksono (2014), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Menurut Wicaksono (2014), ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggapnya bahwa hal tersebut adalah etis untuk dilakukan.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi, biasanya dipengaruhi oleh kelalaian wajib pajak itu sendiri. Mahasiswa akuntansi yang telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai perpajakan diharapkan dapat menjadi individu yang lebih beretika dalam menyikapi penggelapan pajak. Untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian Reskino, dkk (2014) tentang persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 dibeberapa universitas di Jakarta. Mahasiswa akuntansi S1

lebih lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi S2, walaupun perbedaannya tidak terlalu signivikan.

Risa (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Mahasiswa program studi manajemen cenderung memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa program studi akuntansi.

Berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian di atas tentang sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis :

H_1 : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini?

H_2 : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.

H_3 : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi .

H_4 : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut metodenya, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survei *(survey research)* yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa *(explanatory)*. Dalam survei, informasi diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan dari responden yang akan menjadi sampel penelitian ini.

Penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah persepsi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*,teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Objek/ Subjek Penelitian

Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Subjek yang digunakan yaitu mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu (Sugiyono, 2010) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018). Populasi yang digunakan peneliti adalah seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjumlah 3489 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Grahita (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan menghasilkan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Artinya, jika populasi besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling.* Dimana sampel ditentukan dengan kreteria-kreteria yang dibutuhkan pada penelitian. Maka didapatlah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 231 orang. Berikut penarikan sampel berdasarkan kreteria-kreteria :

Tabel 3.1

Kreteria Pemilihan Sampel

No.	Kreteria	Jumlah
1.	Mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	3489 orang
2.	Mahasiswa akuntansi program S1 semester enam keatas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	603 orang
3.	Mengambil konsentrasi perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	231 orang

Sumber : data mahasiswa aktif fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN SUSKA Riau 2018/2019

Tabel 3.2

Jumlah Sampel

No.	Mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan	Jumlah
1.	Mahasiswa konsentrasi perpajakan semester enam	30 orang
2.	Mahasiswa konsentrasi perpajakan semester delapan	88 orang
3.	Mahasiswa konsentrasi perpajakan semester sepuluh	113 orang
		231 orang

Sumber : data mahasiswa aktif fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN SUSKA Riau 2018/2019

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai penggelapan pajak, dalam hal ini adalah persepsi masing-masing kelompok responden yaitu mahasiswa akuntansi konsentrasi pajak pria dan wanita mengenai penggelapan pajak. Variabel persepsi ini diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. Dari pernyataan dalam kuesioner, responden diminta menjawab sesuai tingkat kesetujuannya terhadap penggelapan pajak.

3.4.1 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Menurut Mardiasmo (2016:9), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Official Assessment System* .

   Suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

   Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Jadi yang berwenang menentukan pajak terutang adalah Wajib Pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga.

3.4.2 Keadilan Pajak

Mardiasmo (2009) dalam Aligarh (2017) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadlian dalam pnerapan undang-undang pajak. Keadilan oleh Siahaan (2010:112) dalam Aligarh (2017) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu: prinsip manfaat (*Benefit Principle)*, prinsip kemampuan untuk membayar (*Ability To Pay*), keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

3.4.3 Diskriminasi Pajak

Velasques (2005) dalam Aligarh (2017) mendefinisikan diskriminasi yaitu membedakan suatu objek dari objek lainnya Sebagai contohnya adalah tidak adanya keseimbangan tugas antara pria dan wanita. Hubungan antara diskriminasi pajak dengan persepsi etika penggelapan pajak dapat dikatakan semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak maka penggelapan pajak dapat dipandang sebagai perilaku yang etis, namun semakin rendah tingkat diskriminasi pajak maka

penggelapan pajak dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak etis (Suminarsih, 2011) dalam Aligarh (2017).

3.4.4 Kecurangan Karena Kesengajaan

Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berprilaku (Mangoting, 2017). Sengaja berarti wajib pajak memang menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Dalam (Mangoting, 2017) kesengajaan menurut KBBI adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sengaja dilakukan. Dalam penelitian ini kecurangan wajib pajak sengaja dilakukan karena wajib pajak merasakan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan yang dirasakan masih belum berpihak kepada wajib pajak. Selain itu penegakan hukum belum merata sehingga ada wajib pajak sebagai PKP yang tidak memungut PPN tetapi belum mendapatkan sanksi, dan pengalaman wajib pajak menghadapi petugas yang terkesan mencari-cari kesalahan wajib pajak untuk mendapatkan temuan pemeriksaan.

Kecurangan pajak adalah upaya kesenjangan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemeriksaan. Dalam istilah hukum pidana kesengajaan ini disebut dengan sengaja sadar akan kemungkinan atau kesengajaan secara keinsafan (Ilyas, 2012) dalam (Mangoting, 2017).

Tabel 3.3

Tabel Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Sistem Perpajakan	Mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak	1. Tinggi rendahnya tarif pajak 2. Alokasi iuran pajak

		dilaksanakan.	yang terkumpul (Nickerson, 2009)
2.	Keadilan	Keadilan pajak dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.	1. Pengenaan pajak secara umum dan merata 2. Menndapatkan hak pada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding (Reskino, 2014)
3.	Diskriminasi	Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, suku, dan latar belakang.	1. Pemerintah mendiskriminasi segmen penduduk 2. Pemerintah membedakan agama, suku, dan latar belakang. (Nickerson, 2009)
4.	Kecurangan Karena Kesengajaan	Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berprilaku. Kecurangan pajak adalah upaya kesengajaan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemerikasaan.	1. Insentif / tekanan 2. Kesempatan 3. Sikap / rasionalismme (Arens, 2008:432)

Sumber :Penelitian Terdahulu.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa persepsi mahasiswa akuntansi pajak terhadap penggelapan pajak, yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaanakan diberikan secara langsung dan akan diisi responden secara

langsung dengan mengisi alternatif jawaban yang sudah tersedia. Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-Ragu (R), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang dibagikan kepada responden.

Kuesioner yang disebarkan bersifat tertutup. Dimana dalam kuesioner telah disediakan alternatif-alternatif jawaban Intrumen berupa lembar daftar pertanyaan skala untuk mengukur persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan mengenai penggelapan pajak dengan menggunakan skala Likert (1-5).

Selain kuesioner yang diberikan secara langsung peneliti juga menyediakan kuesioner online yang di sebarkan melalui google form. Google Form atau yang disebut dengan google formulir adalah alat yang berguna untuk membantu mengirim survei, dengan begitu peneliti dapat memberikan atau mengirim kuesioner kepada responden tanpa bertemu langsung oleh responden. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dari tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Menurut Ghozali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Priyatno (2010:12) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), menjelaskan bahwa analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti *mean*, standar deviasi, variasi, modus, jugadilakukan pengukuran *skewness* dan *kurtosis* untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak.

Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informasi bagi orang yang membacanya. Analisis data ini dimaksudkan untuk pengelompokkan data berdasarkan variabel yang diteliti, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diperoleh dari seluruh responden.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

1. **Uji Validitas**

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. Suatu pernyataan dikatakan valid jika tingkat signivikansinya berada dibawa 0,05. Ghozali (2011:52) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), uji validitas digunakan

untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kuisioner. Validitas menunjukan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuran (Azwar, 2000:5) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuisioner adalah *corrected item-total correlation*.

2. **Uji Keandalan / Reabilitas**

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha*nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal (Ghozali, 2009) dalam Reskino (2014). Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018).

3.7.3 Uji Normalitas

Ghozali (2011:160) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Dalam penelitian ini, metode uji normalitas yang digunakan adalah Uji *Kolmogorov*

Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi dalam Uji *Kolmogorov Smirnov* bernilai > 0,05. Sebaliknya, jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2011) dalam Maghfiroh (2016).

3.8 Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik statistik *parametrik*, yaitu *Independent Sample T-test* dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk mengetahui tingkat setuju dan tidak setuju masing-masing responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian ini menggunakan program SPSS versi 25. Uji beda ini digunakan untuk menguji perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Uji beda T Tes Independen bertujuan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda dan membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Apakah kedua kelompok tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Uji beda T Tes Independen dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut :

$$t = \frac{\text{Rata-rata sampel pertama – rata-rata sampel kedua}}{\text{Standar error perbedaan rata-rata kedua sampel}}$$

Langkah awal pengujian adalah melakukan uji dengan melihat pada kesamaanatau perbedaan nilai rata-rata jawaban responden. Setelah itu melihat

pada kesamaanatau perbedaan nilai varian dan mean masing-masing responden. Untuk menerimaatau menolak hipotesis, mengacu pada kriteria :

1. Jika probabilitas > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak, atau artinya kelompokmemiliki varian yang sama.
2. Jika probabilitas < 0,05, maka Ho d itolak, atau artinya kelompok memiliki varian yang berbeda.

Setelah mengetahui ada atau tidaknya perbedaan nilai mean, ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan berikutnya :

1. *Pertama,* harus menguji asumsi apakah varian populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variances assumed*) ataukah berbeda (*equal variances not assumed*) dengan melihat nilai *Levene test*. Setelah diketahui apakah varian sama atau tidak.
2. *Kedua* adalah melihat nilai t-tes untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan.

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini, dapat dilihat t pada rumus dibawah ini :

$$H_1 = H_2 = H_3 : \mu_1 \# \mu_2$$

Dimana :

μ_1 = rata-rata persepsi mahasiswa pria jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Uin Suska Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, keadilan perpajakan, dan juga diskriminasi pajak.

μ_2 = rata-rata persepsi mahasiswa wanita jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan Uin Suska Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, keadilan perpajakan, dan juga diskriminasi pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa wanita dan pria mengenai penggelapan pajak melalui faktor-faktor sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan karena kesengajaan. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, didapatkan lah hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Ialam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang system perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini. Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak. Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi. Terdapat persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya:

1. Disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah faktor yang dapat berhubungan dengan penggelapan pajak seperti tingkat profitabilitas, tingkat hutang, dll.
2. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas sampel agar hasil yang didapat lebih memberikan informasi yang bermanfaat.
3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan disarankan kedepannya ketika sudah memasuki dunia kerja untuk menghindari penggelapan pajak dikarenakan apabila ditemui / diketahui oleh pemerintah akan diberi sanksi berupa denda dan pidana. Disarankan juga untuk menghindari beban pajak, mahasiswa dapat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang perpajakan agar tidak dikategorikan dalam penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abrahams, Nelphy Bryan, & Ari Budi Kristanto, 2016, *"Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga".* Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, No. 1.

Aligarh, Frank, 2017, *"Penggelapan Pajak : Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Kedokteran, dan Hukum"*. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Vol. 15, No. 1.

Awaluddin, Lutfiana, *"Penggelapan Pajak Puluhan Mobil Pupuk Kujang Terungkap Dari Sambara".* Diakses melalui : https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4379105/penggelapan-pajak-puluhan-mobil-pupuk-kujang-terungkap-dari-sambara?_ga=2.181305262.883035307.1555892727-1827649447.1545142284. Pada 22 April 2019.

Boeree, C. George. 2016. *"General Psychology : Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi, & Perilaku"*. Prismasophie : Jogjakarta.

Direktorat Jendral Pajak (2008). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan.* Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jendral Pajak (2009). Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Faradiza, Sekar Akrom, 2018, **"***Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak"*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 11, No.1.

Ghazali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IMB SPSS 19. Semarang :UNDIP.

Hadi, Chairul, *"Kasus Penyelewengan Pajak Di Dispenda Riau Tunggu Audit Kerugian Negar, Tersangka Kemungkinan Bertambah"*. Diakses melalui : https://m.goriau.com/berita/baca/kasus-penyelewengan-

pajak-di-dispenda-riau-tunggu-audit-kerugian-negara-tersangka-berkemungkinan-bertambah.html. Pada 12 April 2019.

Lamia, Miranda. Jenny Morasa., & Sintje Rondonuwu, 2018, "*Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak"*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol.13, No. 4.

Maghforoh, Dhinda, & Diana Fajar Wati, 2016, *"Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak",* JRAK, Vol. 7, No. 1.

Maman, Surahman & Fadilah Ilahi, 2017, "*Konsep Pajak Dalam Hukum Islam",* Amwaluna, Vol.1, No.2.

Mangoting, Yenni, Eko Ganis Sukoharsono, & Nurkholis, 2017, *"Mengak Dimensi Kecurangan Pajak",* Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 8, No. 2.

Mardiasmo. 2016. "*Perpajakan".* Edisi terbaru 2016. Andi : Yogyakarta.

Paramita, A. A. Mirah Pradnya, & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, 2016, *"Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak",* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.17, No.2.

Reskino. Rini., Dinda Novitasari, 2014, *"Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak",* Jurnal Infestasi, Vol.10, No.1.

Resmi, Siti, 2014, *"Perpajakan : Teori dan Kasus",* Salemba Empat : Jakarta.

Risa, Nurma, 2017, "*Sensitivitas Etis Mahasiswa Atas Penggelapan Pajak"*, JRAK, Vol. 8, No. 2.

Saidi, Muhammad Djafar, & Eka Merdekawati Djafar. 2016. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan.* PT Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Sari, Diana. 2013. "*Konsep Dasar Perpajakan".* PT Refika Aditama : Bandung.

Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (13 ed). Bandung : ALFABETA.

Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Tumewu, James, & Wiwin Wahyuni, 2018, "*Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (StudiPada Mahasiswa*

Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)", Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, Vol.4, No. 1.

Utami, Titah Galih, & Teguh Widodo, 2015, *"Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak",* Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15, No. 2.

Wahyudi, Martha Ayu Lusiana, 2016, "*Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Nusantara Pgri)".*

Wicaksono, Muhammad Ary, 2014, *"Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak".*

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

LEMBAR DISPOSISI

Indeks Berkas : 777
Kode : 24 Juni 2019

Hal : Pengambilan Data
Tanggal Surat : 24 Juni 2019
Asal : Nova Ria Wulandari

Nomor : 554

Tanggal Penyelesaian : 24 Juni 2019

Sifat:

I. DEKAN

Diteruskan Kepada :
1. TU 24/06 19
2. Dekan 24/6-2019
3.
4.
5.
6.

II. WADEK / KET.JUR / KABAG. TU.

Kabag Umum
Proses 25/6-2019

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan
Kepada : .....
Tanggal : .....

Husni
Proses 25/06 19

DATA MAHASISWA AKTIF
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
SEMESTER GENAP TAHUN 2018/2019

NO.	FAKULTAS	JURUSAN	JENJANG PROGRAM	TA. 2018/2019		TA. 2017/2018		TA. 2016/2017		TA. 2015/2016		TA. 2014/2015		TA. 2013/2014		TA. 2012/2013		JUMLAH
				SMT I/II		SMT III/IV		SMT V/VI		SMT VII/VIII		SMT IX/X		SMT XI/XII		SMT XIII/XIV		
				LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL	Manajemen	S.1	76	118	74	106	68	99	88	130	70	53	34	9	10	1	936
2		Akuntansi	S.1	38	128	46	126	44	108	70	199	50	53	37	26	12	4	941
3		Administrasi Negara	S.1	58	115	55	116	57	100	84	151	46	27	45	15	11	3	883
4		Manajemen Perusahaan	D.III	29	35	38	55	29	32	25	12	2	2	-	-	-	-	259
5		Akuntansi	D.III	15	18	20	70	20	35	7	12	8	5	-	-	-	-	210
6		Administrasi Perpajakan	D.III	38	36	34	64	25	42	12	5	3	1	-	-	-	-	260
			JUMLAH =	254	450	267	537	243	416	286	509	179	141	116	50	33	8	3489

I. Pertanyaan Umum

1.	Nama							
2.	Nim							
Pilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) atau cheklist (√)								
3.	Jenis Kelamin		Pria		Wanita			
4.	Latar Belakang Pendidikan Terakhir	a.	SMA					
		b.	SMK					
		c.	Pesantren/MA					
		d.	Lainnya					

II. Pernyataan Penelitian

Pernyataan dibawah ini berkaitan dengan keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan kecurangan karena kesengajaan. Saudara/Saudari diminta untuk memberikan tanda **silang** (**X**) atau **cheklist** (√) pada kolom yang menunjukkan persepsi Saudara / Saudari.

a. Faktor Sistem Perpajakan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1.	Penggelapan pajak adalah etis, jika kemungkinan resiko untuk ditangkap/dipenjarakan atas tindakan tersebut kecil.					

2.	Penggelapan pajak adalah etis, jika saya tidak memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah pajak yang disetorkan.					
3.	Penggelapan pajak adalah etis, bahkan jika pengenaan tarif pajak tidak terlalu tinggi tetapi pemerintah tidak memberitahukan jenis dari pajak yang dikenakan (pajak atas apa).					
4.	Penggelapan pajak adalah etis, jika secara signifikan sebagian besar pajak yang disetorkan dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.					
5.	Penggelapan pajak adalah etis, jika otoritas pajak yang ada kurang memadai.					

Sumber : Reskino. Rini., Dinda Novitasari. *"Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak",* Jurnal Infestasi, *vol. 10, No.1, 2014*

b. Faktor Keadilan Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1.	Penggelapan pajak adalah etis, jika orang lain melakukannya.					
2.	Penggelapan pajak adalah etis, jika tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi.					
3.	Penggelapan pajak adalah etis, jika sebagian besar pajak digunakan untuk proyek yang tidak memberikan keuntungan bagi wajib pajak.					
4.	Penggelapan pajak adalah etis, jika penegak hukum yang ada belum memadai dalam menangani kasus pajak yang terjadi.					
5.	Penggelapan pajak adalah etis, jika sebagian besar porsi dari pajak yang dikumpulkan dipergunakan secara tidak merata, misalnya masih banyak daerah-daerah yang tidak merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.					

Sumber : Reskino. Rini., Dinda Novitasari. "*Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak",* Jurnal Infestasi, *vol. 10, No.1, 2014.*

c. Faktor Diskriminasi

No.	Pernyataan	Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1.	Penggelapan pajak adalah etis, jika pemerintah mendiskriminasi saya karena agama, ras, dan latar belakang etnis/budaya.					
2.	Penggelapan pajak adalah etis, jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik, sehingga mendukung adanya penggelapan pajak.					
3.	Penggelapan pajak adalah etis, jika saya tidak mampu untuk membayar pajak.					
4.	Penggelapan pajak adalah etis, jika sistem pajak berjalan dengan tidak adil dan tidak efesien.					
5.	Penggelapan pajak adalah etis, jika pajak digunakan untuk mendukung sebuah perang yang pada akhirnya menimbulkan ketidak adilan.					

Sumber : Reskino. Rini., Dinda Novitasari. "*Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak",* Jurnal Infestasi, *vol. 10, No.1, 2014.*

d. Faktor Kecurangan karena kesengajaan

No.	Pernyataan	Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1.	Penggelapan pajak adalah etis, jika Wajib Pajak melakukan pemalsuan dokumen dalam membuat laporan keuangan.					
2.	Penggelapan pajak adalah etis, jika Wajib Pajak melakukan pemalsuan bukti-bukti transaksi pada laporan komersial dengan mengubah besaran nominalnya.					
3.	Penggelapan pajak adalah etis, jika karyawan saling bekerja sama untuk menaikkan anggaran dalam laporan keuangan tanpa disertai bukti transaksi dan dokumen pendukung yang jelas.					
4.	Penggelapan pajak adalah etis, jika Wajib pajak melaporkan pengungkapan atas laporan keuangan yang kurang memadai dan ada yang ditutuptutupi.					
5.	Penggelapan pajak adalah etis, jika					

	Wajib Pajak menyajikan laporan keuangan yang direkayasa untuk menutupi adanya penggelapan.					

Sumber : Rahmaidha. Rizky. "*Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Skpd Di Kota Magelang)", 2016.*

LAMPIRAN SKOR FAKTOR SISTEM PERPAJAKAN

No.	Responden	FSP1	FSP2	FSP3	FSP4	FSP5	Total
1.	Silvana Dewi	3	2	3	2	1	**11**
2.	Novi Anggraini	4	4	2	1	2	**13**
3.	Najmi Hayatina	4	4	4	4	4	**20**
4.	Tari Nasfita	2	2	4	2	2	**12**
5.	Andin Febriani	2	2	4	2	2	**12**
6.	Nani Yumiarti	2	2	2	2	2	**10**
7.	Syifa Utami Putri	2	2	2	1	2	**9**
8.	Desy Sandia Lubis	2	2	2	2	2	**10**
9.	Rizka Tirtiana Putri	2	2	2	1	2	**9**
10.	Sri Ratih	1	2	1	3	2	**9**
11.	Yelfi Utari	1	2	2	2	2	**9**
12.	Indah Nurafifah	2	3	2	2	1	**10**
13.	Selvia Azura	2	2	3	2	2	**11**
14.	Chania Wulanndari	3	2	2	2	2	**11**
15.	Irma Lia Funna	1	2	2	3	3	**11**
16.	Chika	1	1	4	5	1	**12**
17.	Aprilia	2	2	2	1	3	**10**
18.	Yullyra Rizka	3	3	2	1	2	**11**
19.	Sarah	1	2	2	1	2	**8**
20.	Wan Fitri Rahma	1	1	1	1	1	**5**
21.	Ulpa Gusharita	2	2	1	1	1	**7**
22.	Siti Hajar	2	2	2	2	1	**9**
23.	Yanny Rahmadayu	1	1	1	1	1	**5**
24.	Chantika Seanna P.A	2	2	1	1	1	**7**
25.	Aisa Rahmawati	2	2	2	2	2	**10**
26.	Dhea Safrila	2	2	3	4	3	**14**
27.	Ayu Fitriani	4	3	3	3	3	**16**
28.	Ade Anggraini	4	3	4	3	3	**17**
29.	Reska Zahera	2	2	2	2	2	**10**
30.	Luthfi Fitriati	3	2	2	3	3	**13**
31.	Annisa Mahdiah	2	2	3	2	2	**11**
32.	Liza Rizki	1	2	2	2	2	**9**
33.	Nina Sani Fajarini	2	2	2	2	2	**10**
34.	Nur Azizah	3	2	2	4	3	**14**
35.	Heni Purnama	3	2	2	4	3	**14**

	Sari						
36.	Mifta Aulia Ardana	2	3	2	3	2	**12**
37.	Resti Amelia	3	3	3	3	2	**14**
38.	Muriani	4	3	4	2	2	**15**
39.	Ratnasari Astaria	4	3	4	2	2	**15**
40.	Nadya Septriyuni	4	3	1	3	1	**12**
41.	Nora Asnawati	2	3	2	2	2	**11**
42.	Resi Yulizza	1	1	2	2	4	**10**
43.	Siska Melati Fitri	1	1	2	2	4	**10**
44.	Jihan Amir	1	1	2	2	2	**8**
45.	Ainun Mardiah	2	2	3	1	2	**10**
46.	Fera Wiranti	2	2	2	1	2	**9**
47.	Tiara Marcella	2	2	1	1	1	**7**
48.	Fina Yunia	1	1	1	1	1	**5**
49.	Muhammad Habibie Siregar	1	2	2	4	1	**10**
50.	M. Safi'i	4	4	4	2	3	**17**
51.	Pudja Rahman Dira	2	3	4	5	4	**18**
52.	Riski Dirja Rahmad	4	4	4	4	4	**20**
53.	Akbar Sitepu	3	3	3	3	3	**15**
54.	Aidil Ihsan	3	2	3	3	4	**15**
55.	Herdiansyah	3	2	4	5	3	**17**
56.	supianto	4	4	4	4	3	**19**
57.	Rian	2	4	3	2	2	**13**
58.	Eptario Rajagukguk	1	4	4	1	3	**13**
59.	Syukratullah Yolanda	4	5	2	3	1	**15**
60.	Muhammad Iqbal	1	1	1	1	1	**5**
61.	mohd. Arifin	3	2	2	4	2	**13**
62.	Farhan	4	2	1	4	4	**15**
63.	Agung Media	2	1	1	1	1	**6**
64.	Muhammad Ilham	1	1	2	3	2	**9**
65.	Muslim Budi Sumaryo	4	3	4	4	4	**19**

LAMPIRAN SKOR FAKTOR KEADILAN

No.	Responden	FKD 1	FKD 2	FKD 3	FKD 4	FKD 5	Total
1.	Silvana Dewi	1	1	2	3	3	**10**
2.	Novi Anggraini	2	4	2	4	2	**14**
3.	Najmi Hayatina	4	1	1	1	4	**11**
4.	Tari Nasfita	2	3	3	3	4	**15**
5.	Andin Febriani	2	3	2	3	4	**14**
6.	Nani Yumiarti	2	2	2	2	2	**10**
7.	Syifa Utami Putri	2	2	2	2	2	**10**
8.	Desy Sandia Lubis	2	3	3	3	3	**14**
9.	Rizka Tirtiana Putri	2	2	3	2	2	**11**
10.	Sri Ratih	1	1	1	3	3	**9**
11.	Yelfi Utari	2	2	2	1	2	**9**
12.	Indah Nurafifah	2	4	2	2	1	**11**
13.	Selvia Azura	1	1	1	1	1	**5**
14.	Chania Wulanndari	2	3	3	3	3	**14**
15.	Irma Lia Funna	1	2	2	2	2	**9**
16.	Chika	1	1	1	1	1	**5**
17.	Aprilia	1	2	1	1	1	**6**
18.	Yullyra Rizka	2	2	2	2	2	**10**
19.	Sarah	1	4	1	1	1	**8**
20.	Wan Fitri Rahma	2	3	1	3	1	**10**
21.	Ulpa Gusharita	2	3	2	2	2	**11**
22.	Siti Hajar	1	1	1	1	1	**5**
23.	Yanny Rahmadayu	1	1	1	1	1	**5**
24.	Chantika Seanna P.A	1	1	1	1	1	**5**
25.	Aisa Rahmawati	2	2	3	3	3	**13**
26.	Dhea Safrila	2	4	4	3	4	**17**
27.	Ayu Fitriani	2	3	3	3	4	**15**
28.	Ade Anggraini	3	3	3	3	4	**16**
29.	Reska Zahera	2	2	2	2	2	**10**
30.	Luthfi Fitriati	4	4	4	4	4	**20**
31.	Annisa Mahdiah	3	4	3	5	5	**20**
32.	Liza Rizki	3	2	4	2	4	**15**
33.	Nina Sani Fajarini	1	1	1	2	3	**8**
34.	Nur Azizah	2	4	2	3	4	**15**
35.	Heni Purnama	2	4	2	3	4	**15**

	Sari						
36.	Mifta Aulia Ardana	2	1	1	2	1	**7**
37.	Resti Amelia	1	1	1	1	1	**5**
38.	Muriani	2	3	2	4	4	**15**
39.	Ratnasari Astaria	2	3	2	4	4	**15**
40.	Nadya Septriyuni	3	4	1	4	3	**15**
41.	Nora Asnawati	3	4	2	4	4	**17**
42.	Resi Yulizza	1	1	1	1	4	**8**
43.	Siska Melati Fitri	1	1	1	1	4	**8**
44.	Jihan Amir	1	1	2	2	2	**8**
45.	Ainun Mardiah	1	2	2	2	2	**9**
46.	Fera Wiranti	1	2	2	2	2	**9**
47.	Tiara Marcella	2	3	3	3	2	**13**
48.	Fina Yunia	1	1	1	1	1	**5**
49.	Muhammad Habibie Siregar	2	3	4	4	2	**15**
50.	M. Safi'i	2	3	2	3	2	**12**
51.	Pudja Rahman Dira	2	2	3	3	3	**13**
52.	Riski Dirja Rahmad	2	4	4	4	4	**18**
53.	Akbar Sitepu	2	3	3	3	3	**14**
54.	Aidil Ihsan	3	5	4	4	4	**20**
55.	Herdiansyah	2	2	3	4	4	**15**
56.	supianto	2	3	4	4	3	**16**
57.	Rian	2	2	1	2	2	**9**
58.	Eptario Rajagukguk	2	2	4	3	4	**15**
59.	Syukratullah Yolanda	2	4	3	3	3	**15**
60.	Muhammad Iqbal	1	1	1	1	1	**5**
61.	mohd. Arifin	4	4	2	2	2	**14**
62.	Farhan	2	4	3	4	4	**17**
63.	Agung Media	1	2	2	2	2	**9**
64.	Muhammad Ilham	1	2	2	1	1	**7**
65.	Muslim Budi Sumaryo	2	2	3	3	4	**14**

LAMPIRAN SKOR FAKTOR DISKRIMINASI

No.	Responden	FDK1	FDK2	FDK3	FDK4	FDK5	Total
1.	Silvana Dewi	3	2	2	2	2	**11**
2.	Novi Anggraini	3	1	2	1	1	**8**
3.	Najmi Hayatina	2	3	2	1	4	**12**
4.	Tari Nasfita	4	4	2	2	2	**14**
5.	Andin Febriani	4	4	2	2	2	**14**
6.	Nani Yumiarti	2	2	2	2	2	**10**
7.	Syifa Utami Putri	1	1	2	1	1	**6**
8.	Desy Sandia Lubis	3	3	3	3	3	**15**
9.	Rizka Tirtiana Putri	2	2	3	3	2	**12**
10.	Sri Ratih	3	3	1	1	4	**12**
11.	Yelfi Utari	1	1	1	1	1	**5**
12.	Indah Nurafifah	1	1	1	1	1	**5**
13.	Selvia Azura	1	1	1	1	1	**5**
14.	Chania Wulanndari	5	5	4	5	5	**24**
15.	Irma Lia Funna	2	2	1	2	2	**9**
16.	Chika	3	2	2	3	2	**12**
17.	Aprilia	4	4	3	3	3	**17**
18.	Yullyra Rizka	1	1	3	1	2	**8**
19.	Sarah	1	1	2	2	2	**8**
20.	Wan Fitri Rahma	1	1	1	1	1	**5**
21.	Ulpa Gusharita	2	2	5	2	1	**12**
22.	Siti Hajar	1	1	1	1	1	**5**
23.	Yanny Rahmadayu	1	1	1	1	1	**5**
24.	Chantika Seanna P.A	1	1	1	1	1	**5**
25.	Aisa Rahmawati	2	2	2	4	4	**14**
26.	Dhea Safrila	2	2	2	4	2	**12**
27.	Ayu Fitriani	1	3	5	3	1	**13**
28.	Ade Anggraini	4	4	4	4	4	**20**
29.	Reska Zahera	2	2	2	2	2	**10**
30.	Luthfi Fitriati	4	4	4	4	4	**20**
31.	Annisa Mahdiah	2	3	3	2	2	**12**
32.	Liza Rizki	2	2	2	2	2	**10**
33.	Nina Sani Fajarini	1	2	2	4	4	**13**
34.	Nur Azizah	3	2	2	4	3	**14**
35.	Heni Purnama	3	2	2	4	3	**14**

	Sari						
36.	Mifta Aulia Ardana	1	3	1	2	1	**8**
37.	Resti Amelia	3	2	4	3	5	**17**
38.	Muriani	1	2	2	4	2	**11**
39.	Ratnasari Astaria	1	2	2	4	2	**11**
40.	Nadya Septriyuni	2	3	1	1	2	**9**
41.	Nora Asnawati	3	4	4	4	4	**19**
42.	Resi Yulizza	1	4	4	4	3	**16**
43.	Siska Melati Fitri	1	4	4	4	3	**16**
44.	Jihan Amir	2	2	2	2	3	**11**
45.	Ainun Mardiah	2	2	3	2	2	**11**
46.	Fera Wiranti	2	2	2	2	2	**10**
47.	Tiara Marcella	2	4	2	3	4	**15**
48.	Fina Yunia	1	1	1	1	1	**5**
49.	Muhammad Habibie Siregar	2	2	4	4	2	**14**
50.	M. Safi'i	2	2	4	4	2	**14**
51.	Pudja Rahman Dira	5	5	2	4	4	**20**
52.	Riski Dirja Rahmad	4	4	4	4	4	**20**
53.	Akbar Sitepu	3	3	3	3	3	**15**
54.	Aidil Ihsan	5	4	4	5	5	**23**
55.	Herdiansyah	4	4	2	2	3	**15**
56.	supianto	4	4	3	4	4	**19**
57.	Rian	2	2	4	2	2	**12**
58.	Eptario Rajagukguk	5	2	4	3	5	**19**
59.	Syukratullah Yolanda	5	4	5	5	5	**24**
60.	Muhammad Iqbal	1	1	1	1	1	**5**
61.	mohd. Arifin	2	2	4	4	2	**14**
62.	Farhan	2	4	3	3	2	**14**
63.	Agung Media	1	1	1	2	1	**6**
64.	Muhammad Ilham	3	2	1	3	4	**13**
65.	Muslim Budi Sumaryo	4	4	4	4	3	**19**

LAMPIRAN SKOR FAKTOR KECURANGAN KARENA KESENGAJAAN

No.	Responden	FKKK 1	FKKK 2	FKKK 3	FKKK 4	FKKK 5	Total
1.	Silvana Dewi	1	2	2	2	2	**9**
2.	Novi Anggraini	1	1	1	1	1	**5**
3.	Najmi Hayatina	2	2	2	2	3	**11**
4.	Tari Nasfita	1	2	2	2	2	**9**
5.	Andin Febriani	2	2	2	2	2	**10**
6.	Nani Yumiarti	1	1	2	2	2	**8**
7.	Syifa Utami Putri	1	1	2	2	2	**8**
8.	Desy Sandia Lubis	2	2	2	2	2	**10**
9.	Rizka Tirtiana Putri	2	2	2	2	2	**10**
10.	Sri Ratih	1	1	2	3	2	**9**
11.	Yelfi Utari	1	2	1	1	2	**7**
12.	Indah Nurafifah	2	3	2	1	1	**9**
13.	Selvia Azura	1	1	1	1	1	**5**
14.	Chania Wulanndari	3	2	4	3	3	**15**
15.	Irma Lia Funna	2	2	3	3	1	**11**
16.	Chika	4	2	2	3	3	**14**
17.	Aprilia	2	2	3	2	2	**11**
18.	Yullyra Rizka	1	1	2	1	1	**6**
19.	Sarah	3	3	4	4	4	**18**
20.	Wan Fitri Rahma	1	4	4	1	1	**11**
21.	Ulpa Gusharita	1	1	1	1	1	**5**
22.	Siti Hajar	1	1	2	1	2	**7**
23.	Yanny Rahmadayu	1	1	1	1	1	**5**
24.	Chantika Seanna P.A	1	1	1	1	1	**5**
25.	Aisa Rahmawati	2	3	3	3	2	**13**
26.	Dhea Safrila	2	3	2	3	2	**12**
27.	Ayu Fitriani	3	2	2	3	1	**11**
28.	Ade Anggraini	3	3	2	2	3	**13**
29.	Reska Zahera	2	2	2	2	2	**10**
30.	Luthfi Fitriati	3	2	2	2	2	**11**
31.	Annisa Mahdiah	2	2	2	3	3	**12**
32.	Liza Rizki	2	2	4	2	2	**12**
33.	Nina Sani Fajarini	2	2	2	2	1	**9**

34.	Nur Azizah	2	2	3	2	3	**12**
35.	Heni Purnama Sari	2	2	3	2	3	**12**
36.	Mifta Aulia Ardana	3	3	3	3	3	**15**
37.	Resti Amelia	2	2	3	3	3	**13**
38.	Muriani	2	1	2	4	2	**11**
39.	Ratnasari Astaria	2	1	2	4	2	**11**
40.	Nadya Septriyuni	3	2	1	3	3	**12**
41.	Nora Asnawati	3	4	4	4	4	**19**
42.	Resi Yulizza	1	1	1	1	4	**8**
43.	Siska Melati Fitri	1	1	1	1	4	**8**
44.	Jihan Amir	1	2	2	2	2	**9**
45.	Ainun Mardiah	1	2	2	2	2	**9**
46.	Fera Wiranti	2	2	2	2	2	**10**
47.	Tiara Marcella	3	3	3	3	3	**15**
48.	Fina Yunia	1	1	1	1	1	**5**
49.	Muhammad Habibie Siregar	1	2	1	1	2	**7**
50.	M. Safi'i	2	2	2	3	2	**11**
51.	Pudja Rahman Dira	1	1	2	4	2	**10**
52.	Riski Dirja Rahmad	2	2	2	3	3	**12**
53.	Akbar Sitepu	3	3	3	3	3	**15**
54.	Aidil Ihsan	5	2	1	3	3	**14**
55.	Herdiansyah	3	3	3	3	3	**15**
56.	supianto	2	2	4	4	3	**15**
57.	Rian	1	2	2	2	2	**9**
58.	Eptario Rajagukguk	2	2	4	4	1	**13**
59.	Syukratullah Yolanda	1	2	3	2	4	**12**
60.	Muhammad Iqbal	1	1	1	4	1	**8**
61.	mohd. Arifin	4	4	2	4	4	**18**
62.	Farhan	4	3	4	4	3	**18**
63.	Agung Media	1	2	1	2	1	**7**
64.	Muhammad Ilham	3	3	3	3	3	**15**
65.	Muslim Budi Sumaryo	2	2	3	4	3	**14**

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

FAKTOR SISTEM PERPAJAKAN

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.666**	.410**	.356**	.335**	.760**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.004	.006	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P2	Pearson Correlation	.666**	1	.482**	.213	.247*	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.088	.047	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P3	Pearson Correlation	.410**	.482**	1	.436**	.477**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P4	Pearson Correlation	.356**	.213	.436**	1	.480**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.004	.088	.000		.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P5	Pearson Correlation	.335**	.247*	.477**	.480**	1	.692**
	Sig. (2-tailed)	.006	.047	.000	.000		.000
	N	65	65	65	65	65	65
Total	Pearson Correlation	.760**	.700**	.768**	.710**	.692**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65	65

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	65	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	5

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

FAKTOR KEADILAN

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.577**	.462**	.511**	.509**	.730**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P2	Pearson Correlation	.577**	1	.531**	.685**	.412**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P3	Pearson Correlation	.462**	.531**	1	.647**	.555**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P4	Pearson Correlation	.511**	.685**	.647**	1	.653**	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P5	Pearson Correlation	.509**	.412**	.555**	.653**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
	N	65	65	65	65	65	65
Total	Pearson Correlation	.730**	.802**	.796**	.883**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65	65

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	65	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.857	5

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

FAKTOR DISKRIMINASI

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.683**	.424**	.502**	.713**	.818**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P2	Pearson Correlation	.683**	1	.502**	.593**	.641**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P3	Pearson Correlation	.424**	.502**	1	.639**	.450**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P4	Pearson Correlation	.502**	.593**	.639**	1	.653**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P5	Pearson Correlation	.713**	.641**	.450**	.653**	1	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	65	65	65	65	65	65
Total	Pearson Correlation	.818**	.835**	.738**	.832**	.851**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65	65

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	65	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.873	5

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

FAKTOR KECURANGAN KARENA KESENGAJAAN

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.583**	.369**	.562**	.483**	.803**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P2	Pearson Correlation	.583**	1	.573**	.332**	.387**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.007	.001	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P3	Pearson Correlation	.369**	.573**	1	.497**	.334**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.007	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P4	Pearson Correlation	.562**	.332**	.497**	1	.380**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000		.002	.000
	N	65	65	65	65	65	65
P5	Pearson Correlation	.483**	.387**	.334**	.380**	1	.691**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.007	.002		.000
	N	65	65	65	65	65	65
Total	Pearson Correlation	.803**	.746**	.739**	.761**	.691**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65	65

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	65	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.801	5

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FSP-W	48	5	17	10.65	2.756
FSP-P	17	5	20	14.06	4.423
TKD-W	48	5	20	11.02	4.113
TKD-P	17	5	20	13.41	3.938
FDK-W	48	5	24	11.46	4.519
FDK-P	17	5	24	15.65	5.207
FKKK-W	48	5	19	10.21	3.261
FKKK-P	17	7	18	12.53	3.466

HASIL UJI NORMALITAS

FAKTOR SISTEM PERPAJAKAN

Tests of Normality							
		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	JenisKelamin	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
FSP	Wanita	.116	48	.123	.971	48	.289
	Pria	.172	17	.191	.927	17	.195

a. Lilliefors Significance Correction

HASIL UJI NORMALITAS

FAKTOR KEADILAN

Tests of Normality							
		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	JenisKelamin	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TKD	Wanita	.120	48	.082	.945	48	.054
	Pria	.206	17	.052	.939	17	.304

a. Lilliefors Significance Correction

HASIL UJI NORMALITAS

FAKTOR DISKRIMINASI

Tests of Normality							
		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	JenisKelamin	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
FDK	Wanita	.098	48	.200*	.953	48	.051
	Pria	.152	17	.200*	.935	17	.267

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

HASIL UJI NORMALITAS

FAKTOR KECURANGAN KARENA KESENGAJAAN

Tests of Normality							
		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	JenisKelamin	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
FKKK	Wanita	.104	48	.200*	.957	48	.078
	Pria	.135	17	.200*	.942	17	.346

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

HASIL UJI INDEPENDENT-SAMPEL T-TEST

FAKTOR SISTEM PERPAJAKAN

Group Statistics

	JenisKelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
FSP	Wanita	48	10.65	2.756	.398
	Pria	17	14.06	4.423	1.073

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
FSP	Equal variances assumed	5.625	.021	-3.708	63	.000	-3.413	.920	-5.252	-1.574
	Equal variances not assumed			-2.983	20.571	.007	-3.413	1.144	-5.795	-1.031

HASIL UJI INDEPENDENT-SAMPEL T-TEST

FAKTOR KEADILAN

Group Statistics

	JenisKelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
TKD	Wanita	48	11.02	4.113	.594
	Pria	17	13.41	3.938	.955

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
TKD	Equal variances assumed	.487	.488	-2.082	63	.041	-2.391	1.148	-4.686	-.096
	Equal variances not assumed			-2.126	29.263	.042	-2.391	1.125	-4.690	-.092

HASIL UJI INDEPENDENT-SAMPEL T-TEST

FAKTOR DISKRIMINASI

Group Statistics

	JenisKelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
FDK	Wanita	48	11.46	4.519	.652
	Pria	17	15.65	5.207	1.263

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
FDK	Equal variances assumed	.464	.498	-3.155	63	.002	-4.189	1.328	-6.842	-1.536
	Equal variances not assumed			-2.947	25.067	.007	-4.189	1.421	-7.116	-1.261

HASIL UJI INDEPENDENT-SAMPEL T-TEST

FAKTOR KECURANGAN KARENA KESENGAJAAN

Group Statistics

	JenisKelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
FKKK	Wanita	48	10.21	3.261	.471
	Pria	17	12.53	3.466	.841

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
FKKK	Equal variances assumed	.368	.546	-2.481	63	.016	-2.321	.935	-4.191	-.452
	Equal variances not assumed			-2.409	26.712	.023	-2.321	.964	-4.299	-.343

RIWAYAT HIDUP

Nova Ria Wulandari dilahirkan di Indragiri Hulu, 28 November 1996. Lahir dari pasangan Bapak Solikin dan Ibu Amih Sapnih, dan merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara. Mengawali Sekolah Dasar di SDN 015 Singingi dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2009 melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 04 Singingi dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 02 Singingi dan lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, program studi Akuntansi S1.

Padatahun 2015 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diterima sebagai mahasiswi di Program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, selama lebih kurang dua bulan terhitung tanggal 10 Juli-30 Agustus 2018.

Penulis melaksanakan seminar proposal padatanggal 19 Juni 2019 Dan melaksanakan Ujian Munaqasah dan dinyatakan LULUS Serta memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 dengan judul "Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau)", dengan IPK terakhir 3,33 dengan predikat Sangat Memuaskan.